2

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018

DEWANPERS

2

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018

DEWAN**PERS**

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018

Diterbitkan oleh:
Dewan Pers
Jakarta, Desember 2018

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018

20 TAHUN REFORMASI
Pasang-Surut Kemerdekaan Pers Indonesia

Penanggung Jawab:
Yosep Adi Prasetyo

Wakil Penanggung Jawab:
Ratna Komala

Koordinator Tim Peneliti:
Antonio Pradjasto Hardojo

Anggota Tim Penulis Laporan dan Editor:
Antonio Pradjasto Hardojo
DR. Artini, M.Si
Winarto
Dwi Ajeng Widarini
Dian Andi Nur Aziz
Rustam Fachry Mandayun
Moebanoe Moera
Christiana Chelsia Chan

Tim Penulis:
- Nur Anisah, M.Si; Rahmat Saleh, M.Comm; Dr. Hamdani M. Syam, MA
- Drs. Hendra Harahap, M.Si., PhD; Farida Hanim, S.Sos., M.I.Kom; Dra. Fatma Wardy Lubis, MA
- Jupendri, S.Sos., M.I.Kom; Jayus, S.Sos., M.I.Kom; Hasan Basril
- Drs. Zamzami A Karim, M.A; Shahril Budiman, S.Sos., MPM; Raja Dachroni, S.Sos., M.Si
- Prof. Dr. rer.SOZ. Nursyirwan Effendi; Dr. Dodi Devianto, MSc; Lucky Zamzami, S.Sos., M.Soc.Sc
- Wahyu Widiastuti, S.Sos., M.Sc; Dionni Ditya Perdana, S.Ikom., M.Ikom; Delfan Eko Putra, S.Ikom., M.Si
- Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si; Isabella, M.Si; Sena Putra Prabujaya, M.AP;
- Dr. Ibrahim, M.Si; Sandy Pratama, S.IP., M.Si; Sujadmi, S.Sos., M.A
- Dr. Hartoyo, M.Si; Tony Wijaya, S.Sos., M.Kom; Drs. Sarwoko, M.Si; Ir. Budi Santoso Budiman
- Dr. Ilham Wahyudi, SE., M.Si; Andi Mirdah, S.E., M.SA(HumBis),Ak,CA; Dr. Rico Wijaya Z, S.E., M.M., M.Si, Ak.
- Dr. Nina Mutmainnah; Dr. Donna Asteria; Erlangga Saputra
- Dr. Ayatullah Humaeni, MA; Muhibuddin, M.Si; Muhammad Syafar, M. Kesos
- Giandi Kartasasmita, M.A; Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D; Anggia Valerisha, M.Si
- S. Rouli Manalu, Ph.D; Dr. Turnomo Rahardhjo; Agus Naryoso, M.Si; M. Bayu Widagdo, M.I.Kom
- Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA; Puji Rianto, S.IP., MA; Ali Minanto, S.Sos., MA
- Aloysia Vira Herawati, S.S., M.Hum.RightEdu; Dian Noeswantari, S.Pi., MPAA; Inge Christanti, S.S., M.Hum.RightPrac.
- Dr. Ni Made Ras Amanda Gel gel, S.Sos., M.Si; Ni Nyoman Dewi Pascarani, S.S., M.Si;
- I Dewa Ayu --Sugiarica Joni, S.Sos., M.A; Ade Devia Pradipta, S.E., M.A
- Ahmad Sirulhaq, MA; Abdul Latif Apriaman, S.Kom; Ahmad Hiswandi, S.H
- Mariana A. Noya Letuna, S.Sos., MA; Rendy H Abraham, S.Ikom., M.Ikom; Juan A. Nafie, S.Ikom., M.Ikom
- Acan Mahdi, S.Sos., M.Si; Heryanto, S.Pd

- Dr. Ir. H. Saputera, M.Si; Dr. Ir. Uras Tantulo, M.Sc; Dr. Jhon Retei Alfrisandi, S.Si., M.Si
- Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd; Dr. Ariesta Heksarini, SE., M.M; Dr. Irwan Setiawan, S.Pd., M.Pd
- Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H; Arif Rohman, SHI., LL.M; Aditia Syaprillah, SH., MH; Dr. Syahran, SE., M.Sc
- Andi Subhan Amir, S.Sos., M.Si; Dr. H. Moeh. Iqbal Sultan, M.Si; Drs. Abdul Gafar, M.Si; Alem Febri Sonni, S.Sos., M.Si
- Dr. Grace J. Waleleng, S.Sos., Msi; Dr. Ferry D.M Liando, SIP., M.Si; Lingkan Tulung, S.Sos., M.Grad.Dip.Pub.Pol
- Dr. Rahmat Bakri, SH; Asri lasatu; Insarullah; M. Fardhal Pratama
- Sumadi Dilla, S.Sos, M.Si; DR. Zulfiah Larizu, M.Si; Harnina Ridwan Z, S.IP., M.Si; Ikrima Nurfikriah, S.IP., M.Sc
- Dr. Lukman A.R. Laliyo, M.Pd., MM; Dr. Lilan Dama, S.Pd., M.Pd; Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
- Muhammad, S.IP., M.Si; Rizky Halim Mubin, S.H., M.H; Marsudi Makmur, S.Pr., M.Si
- Zulfiqar M.A. Lestaluhu, S.Sos., M.Si; Dayanto, SH., MH; Andi M. Ayub, HT., Pd., MPd
- Nam Rumkel, S.Ag., M.H; Dr. Abdul Rahman Jannang, S.T., S.E., M.M; Jamal Arsad, S.H., MH
- Dr. Marudut Hasugian, SH., MH; Dr. Josner Simanjutak, SH., MH; Tri Yanuaria, SH., MH
- Dr. Ir. Benidiktus Tanujaya, M.Si; Jan Hendriek Nunaki, S.Pd., M.Si; Ir. Surianto Bataradewa, M.Si

Editor Bahasa:
Sapta Maryati**, dkk**

Foto Cover:
shutterstock/Bunga Tiara

Desain Grafis:
Rudy Moses**, dkk**

Cetakan Pertama: Desember 2018

Hak Cipta: Dewan Pers

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbit (KDT)

Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2018

-Cet. I.—Jakarta: DEWAN PERS; 2018

xliv+ 706 hlm, 23,5 cm X 28,5 cm

ISBN: **978-602-8721-34-9**

DEWAN**PERS**

Diterbitkan oleh:
Dewan Pers
Gedung Dewan Pers Lantai 7-8; Jl. Kebon Sirih No. 32-34; Jakarta Pusat
Telp. (021) 3504875, 77; Faks. (021) 3446575
Website: www.dewanpers.or.id
E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id; pengaduan@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Dewan Pers xxxix
Prakata Ketua Tim Pelaksana IKP 2018 xliii

1. PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi dan Iklim 3
B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Aceh 3
C. Kasus-Kasus Kekerasan Jurnalistik 4

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 9
2. Kebebasan dari Intervensi 9
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 10
4. Kebebasan Media Alternatif 11
5. Keragaman Pandangan dalam Media 11
6. Akurat dan Berimbang 11
7. Akses atas Informasi Publik 12
8. Pendidikan Insan Pers 13
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 13

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 15
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 16
3. Keragaman Kepemilikan 16
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 17
5. Lembaga Penyiaran Publik 17

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 18
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 19
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 19
4. Etika Pers 20
5. Mekanisme Pemulihan 20
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 21

2. PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I: GAMBARAN UMUM

Geografi dan Iklim 25

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 27
2. Kebebasan dari Intervensi 28
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 28
4. Kebebasan Media Alternatif 29
5. Keragaman Pandangan dalam Media 30
6. Akurat dan Berimbang 30
7. Akses atas Informasi Publik 31
8. Pendidikan Insan Pers 31
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 32

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 33
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 34
3. Keragaman Kepemilikan 35
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 35
5. Lembaga Penyiaran Publik 36

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 37
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 37
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 38
4. Etika Pers 38
5. Mekanisme Pemulihan 39
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 39

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 40

3. PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi dan Iklim 43
B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Sumatera Barat 43
C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik 45

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 49
2. Kebebasan dari Intervensi 50
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 51
4. Kebebasan Media Alternatif 53
5. Keragaman Pandangan dalam Media 54
6. Akurat dan Berimbang 55
7. Akses atas Informasi Publik 56
8. Pendidikan Insan Pers 57
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 57

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 59
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 61
3. Keragaman Kepemilikan 62
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 62
5. Lembaga Penyiaran Publik 63

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 65
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 66
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 67
4. Etika Pers 68
5. Mekanisme Pemulihan 69
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 70

4. PROVINSI RIAU

BAB I: GAMBARAN UMUM

Organisasi Jurnalis 75
Kekerasan Terhadap Jurnalis 75
Perusahaan Pers 76

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI RIAU

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 77
2. Kebebasan dari Intervensi 78
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 79
4. Kebebasan Media Alternatif 80

5. Keragaman Pandangan dalam Media 80
6. Akurat dan Berimbang 80
7. Akses atas Informasi Publik 81
8. Pendidikan Insan Pers 81
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 82

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 83
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 84
3. Keragaman Kepemilikan 84
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 85
5. Lembaga Penyiaran Publik 85

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 86
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 87
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 87
4. Etika Pers 87
5. Mekanisme Pemulihan 88
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 88

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 89

5. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi Kepulauan Riau 93
B. Profil Media Provinsi Kepulauan Riau 94
C. Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau 99

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 102
2. Kebebasan dari Intervensi 103
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 104
4. Kebebasan Media Alternatif 105
5. Keragaman Pandangan dalam Media 105
6. Akurat dan Berimbang 106
7. Akses atas Informasi Publik 106

8. Pendidikan Insan Pers 107
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 108

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 108
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 109
3. Keragaman Kepemilikan 110
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 110
5. Lembaga Penyiaran Publik 110

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 111
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 111
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 111
4. Etika Pers 112
5. Mekanisme Pemulihan 112
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 112

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 113

6. PROVINSI BANGKA BELITUNG

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Geografis 117
B. Gambaran Demografis 118
C. Media dan Perkembangannya 118

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 119
2. Kebebasan dari Intervensi 120
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 121
4. Kebebasan Media Alternatif 122
5. Keragaman Pandangan dalam Media 122
6. Akurat dan Berimbang 123
7. Akses atas Informasi Publik 123
8. Pendidikan Insan Pers 124
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 124

B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 125
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 127
3. Keragaman Kepemilikan 128
4. Tata Kelola Perusahaan 129
5. Lembaga Penyiaran Publik 130
C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 131
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 132
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 133
4. Etika Pers 134
5. Mekanisme Pemulihan 135
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 136

BAB III : PENUTUP
1. Kesimpulan dan Rekomendasi 139

7. PROVINSI JAMBI

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Perbandingan IKP di Provinsi Jambi 145

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI JAMBI
A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 146
2. Kebebasan dari Intervensi 147
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 148
4. Kebebasan Media Alternatif 149
5. Keragaman Pandangan dalam Media 150
6. Akurat dan Berimbang 150
7. Akses atas Informasi Publik 151
8. Pendidikan Insan Pers 152
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 152
B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 153
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 155
3. Keragaman Kepemilikan 156
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 156
5. Lembaga Penyiaran Publik 157

C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 157
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 158
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 159
4. Etika Pers 159
5. Mekanisme Pemulihan 160
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 161

BAB III : PENUTUP
1. Kesimpulan dan Rekomendasi 165

8. PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi Sumatera Selatan 169
B. Profil Media di Sumatera Selatan 169
C. Media Televisi di Sumatera Selatan 170
D. Stasiun Radio di Kota Palembang 170
E. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan 171
F. Tim Peneliti dan Informan Ahli 172

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 173
2. Kebebasan dari Intervensi 174
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 175
4. Kebebasan Media Alternatif 176
5. Keragaman Pandangan dalam Media 176
6. Akurat dan Berimbang 177
7. Akses atas Informasi Publik 178
8. Pendidikan Insan Pers 179
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 179

B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 180
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 182
3. Keragaman Kepemilikan 183
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 183
5. Lembaga Penyiaran Publik 184

C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 186
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 187
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 187
4. Etika Pers 188
5. Mekanisme Pemulihan 189
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 190

BAB III : PENUTUP
1. Kesimpulan dan Rekomendasi 192

9. PROVINSI BENGKULU

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi 195
B. Profil Media 195
C. Organisasi Wartawan 197
D. Tim Peneliti dan Informan Ahli 197

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BENGKULU
A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 198
2. Kebebasan dari Intervensi 199
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 200
4. Kebebasan Media Alternatif 200
5. Keragaman Pandangan dalam Media 201
6. Akurat dan Berimbang 201
7. Akses atas Informasi Publik 202
8. Pendidikan Insan Pers 203
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 203
B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 204
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 206
3. Keragaman Kepemilikan 207
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 207
5. Lembaga Penyiaran Publik 208
C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 210

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 210
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 211
4. Etika Pers 211
5. Mekanisme Pemulihan 212
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 212

10. PROVINSI LAMPUNG

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Kependudukan 215
B. Profil Media Massa 215
C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalis 218
D. Peraturan Terkait Kemerdekaan Pers 218

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI LAMPUNG

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 221
2. Kebebasan dari Intervensi 222
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 223
4. Kebebasan Media Alternatif 224
5. Keragaman Pandangan dalam Media 224
6. Akurat dan Berimbang 225
7. Akses atas Informasi Publik 226
8. Pendidikan Insan Pers 227
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 227

B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 229
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 230
3. Keragaman Kepemilikan 231
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 231
5. Lembaga Penyiaran Publik 232

C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 234
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 234
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 234
4. Etika Pers 235
5. Mekanisme Pemulihan 236
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 236

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 237

11. PROVINSI BANTEN

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil media 241

B. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalis 241

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BANTEN

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 243
2. Kebebasan dari Intervensi 243
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 244
4. Kebebasan Media Alternatif 244
5. Keragaman Pandangan dalam Media 245
6. Akurat dan Berimbang 245
7. Akses atas Informasi Publik 245
8. Pendidikan Insan Pers 245
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 245

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 246
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 247
3. Keragaman Kepemilikan 248
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 248
5. Lembaga Penyiaran Publik 249

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 250
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 251
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 251
4. Etika Pers 251
5. Mekanisme Pemulihan 251
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 252

12. PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Media 255

B. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalis 255

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 258
2. Kebebasan dari Intervensi 259
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 260
4. Kebebasan Media Alternatif 261
5. Keragaman Pandangan dalam Media 261
6. Akurat dan Berimbang 262
7. Akses atas Informasi Publik 262
8. Pendidikan Insan Pers 263
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 263

B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 264
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 265
3. Keragaman Kepemilikan 266
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 266
5. Lembaga Penyiaran Publik 266

C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 267
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 267
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 268
4. Etika Pers 268
5. Mekanisme Pemulihan 269
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 270

13. PROVINSI JAWA BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi 273
B. Profil Media di Jawa Barat 273
C. Organisasi Jurnalis dan Serikat Pekerja Wartawan..... 274

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI JAWA BARAT

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 275
2. Kebebasan dari Intervensi 276

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 276
4. Kebebasan Media Alternatif 277
5. Keragaman Pandangan dalam Media 278
6. Akurat dan Berimbang 278
7. Akses atas Informasi Publik 279
8. Pendidikan Insan Pers 279
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 280

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 281
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 282
3. Keragaman Kepemilikan 283
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 283
5. Lembaga Penyiaran Publik 284

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 285
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 286
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 286
4. Etika Pers 287
5. Mekanisme Pemulihan 287
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 287

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 289

14. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Media Di Daerah Istimewa Yogyakarta..... 294
B. Kasus-kasus Terkait Kemerdekaan Pers 296
C. Profil Jurnalis, Organisasi Jurnalis dan Serikat Pekerja 297

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 299
2. Kebebasan dari Intervensi 300
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 301
4. Kebebasan Media Alternatif 303
5. Keragaman Pandangan dalam Media 304

6. Akurat dan Berimbang 305
7. Akses atas Informasi Publik 306
8. Pendidikan Insan Pers 307
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 308

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 309
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 311
3. Keragaman Kepemilikan 312
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 313
5. Lembaga Penyiaran Publik 314

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 316
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 316
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 317
4. Etika Pers 317
5. Mekanisme Pemulihan 319
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 320

15. PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah 325
B. Profil Media di Jawa Tengah 327
C. Data Kekerasan terhadap Jurnalis 327
D. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum 328

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 330
2. Kebebasan dari Intervensi 331
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 332
4. Kebebasan Media Alternatif 333
5. Keragaman Pandangan dalam Media 333
6. Akurat dan Berimbang 334
7. Akses atas Informasi Publik 334
8. Pendidikan Insan Pers 335
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 336

B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 337
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 338
3. Keragaman Kepemilikan 339
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 339
5. Lembaga Penyiaran Publik 340
C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 342
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 343
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 344
4. Etika Pers 344
5. Mekanisme Pemulihan 345
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 346

BAB III : PENUTUP
1. Kesimpulan dan Rekomendasi 347

16. PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I: GAMBARAN UMUM
A. Profil Demografi Jawa Timur 351
B. Organisasi Wartawan 351
C. Serikat Pekerja Wartawan 351
D. Organisasi Lembaga Media 352
E. Profil Perusahaan Media 352

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI JAWA TIMUR
A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 352
2. Kebebasan dari Intervensi 353
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 354
4. Kebebasan Media Alternatif 355
5. Keragaman Pandangan dalam Media 356
6. Akurat dan Berimbang 356
7. Akses atas Informasi Publik 357
8. Pendidikan Insan Pers 358
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 358

B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 359
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 360
3. Keragaman Kepemilikan 362
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 362
5. Lembaga Penyiaran Publik 363
C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 364
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 364
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 365
4. Etika Pers 365
5. Mekanisme Pemulihan 366
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 366

BAB III : PENUTUP
1. Kesimpulan dan Rekomendasi 371

17. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Demografi 375
B. Profil Media 376
C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan 376
D. Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Persoalan Kemerdekaan Pers..... 377

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 377
2. Kebebasan dari Intervensi 378
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 379
4. Kebebasan Media Alternatif 379
5. Keragaman Pandangan dalam Media 380
6. Akurat dan Berimbang 380
7. Akses atas Informasi Publik 381
8. Pendidikan Insan Pers 381
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 381

B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 382
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 383
3. Keragaman Kepemilikan 384
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 384
5. Lembaga Penyiaran Publik 385
C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 385
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 386
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 386
4. Etika Pers 387
5. Mekanisme Pemulihan 387
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 388

BAB III : PENUTUP
1. Kesimpulan dan Rekomendasi 389

18. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Media 393
B. Organisasi Profesi 394
C. Kekerasan Terhadap Jurnalis 394

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 397
2. Kebebasan dari Intervensi 397
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 398
4. Kebebasan Media Alternatif 398
5. Keragaman Pandangan dalam Media 399
6. Akurat dan Berimbang 399
7. Akses atas Informasi Publik 400
8. Pendidikan Insan Pers 400
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 400
B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 401
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 402
3. Keragaman Kepemilikan 402

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 403
5. Lembaga Penyiaran Publik 403

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 404
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 404
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 405
4. Etika Pers 405
5. Mekanisme Pemulihan 406
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 406

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 407

19. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi 411
B. Profil Organisas dan Serikat Pekerja Wartawan 411
C. Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan..... 411

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 413
2. Kebebasan dari Intervensi 414
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 415
4. Kebebasan Media Alternatif 416
5. Keragaman Pandangan dalam Media 417
6. Akurat dan Berimbang 418
7. Akses atas Informasi Publik 418
8. Pendidikan Insan Pers 419
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 420

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 421
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 422
3. Keragaman Kepemilikan 423
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 423
5. Lembaga Penyiaran Publik 423

C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 425
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 425
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 426
4. Etika Pers 426
5. Mekanisme Pemulihan 426
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 427

BAB III : PENUTUP
1. Kesimpulan dan Rekomendasi 428

20. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BAB I: GAMBARAN UMUM
A. Profil Demografi 429

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 432
2. Kebebasan dari Intervensi 433
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 434
4. Kebebasan Media Alternatif 434
5. Keragaman Pandangan dalam Media 435
6. Akurat dan Berimbang 435
7. Akses atas Informasi Publik 436
8. Pendidikan Insan Pers 436
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 436
B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 437
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 439
3. Keragaman Kepemilikan 439
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 440
5. Lembaga Penyiaran Publik 440
C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 441
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 442
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 442
4. Etika Pers 442

5. Mekanisme Pemulihan 443
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 443

BAB III : PENUTUP
1. Kesimpulan dan Rekomendasi 444

21. PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Kalimantan Utara 447
B. Profil Media 447
C. Organisasi Jurnalis Kalimantan Utara 449

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 449
2. Kebebasan dari Intervensi 450
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 450
4. Kebebasan Media Alternatif 451
5. Keragaman Pandangan dalam Media 451
6. Akurat dan Berimbang 452
7. Akses atas Informasi Publik 452
8. Pendidikan Insan Pers 452
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 453
B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 453
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 454
3. Keragaman Kepemilikan 455
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 455
5. Lembaga Penyiaran Publik 456
C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 457
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 457
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 458
4. Etika Pers 458
5. Mekanisme Pemulihan 459
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 459

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 460

22. PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Demografi Provinsi Sulawesi Selatan 463
B. Kondisi Geografi 463
C. Kondisis Topografi 464
D. Aspek Demografi 464
E. Sejarah Pemerintahan 464

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 465
2. Kebebasan dari Intervensi 466
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 467
4. Kebebasan Media Alternatif 467
5. Keragaman Pandangan dalam Media 468
6. Akurat dan Berimbang 468
7. Akses atas Informasi Publik 469
8. Pendidikan Insan Pers 469
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 469

B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 470
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 471
3. Keragaman Kepemilikan 472
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 472
5. Lembaga Penyiaran Publik 473

C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 474
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 474
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 475
4. Etika Pers 475
5. Mekanisme Pemulihan 476
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 476

BAB III : PENUTUP
1. Kesimpulan dan Rekomendasi 478

23. PROVINSI SULAWESI UTARA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi 481
B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Sulawesi Utara 481
C. Provil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan 482
D. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik 482

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI UTARA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 484
2. Kebebasan dari Intervensi 484
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 485
4. Kebebasan Media Alternatif 485
5. Keragaman Pandangan dalam Media 486
6. Akurat dan Berimbang 487
7. Akses atas Informasi Publik 487
8. Pendidikan Insan Pers 488
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 488

B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 489
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 490
3. Keragaman Kepemilikan 491
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 491
5. Lembaga Penyiaran Publik 492

C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 494
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 494
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 494
4. Etika Pers 495
5. Mekanisme Pemulihan 496
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 496

BAB III : PENUTUP
1. Kesimpulan dan Rekomendasi 497

24. PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Media di Provinsi Sulawesi Tengah 503
B. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Indonesia 504

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 506
2. Kebebasan dari Intervensi 507
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 508
4. Kebebasan Media Alternatif 509
5. Keragaman Pandangan dalam Media 509
6. Akurat dan Berimbang 510
7. Akses atas Informasi Publik 510
8. Pendidikan Insan Pers 511
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 512

B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 513
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 514
3. Keragaman Kepemilikan 515
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 515
5. Lembaga Penyiaran Publik 516

C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 517
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 518
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 518
4. Etika Pers 519
5. Mekanisme Pemulihan 519
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 521

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 525

25. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Pers 529

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 531
2. Kebebasan dari Intervensi 531
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 532
4. Kebebasan Media Alternatif 532
5. Keragaman Pandangan dalam Media 533
6. Akurat dan Berimbang 533
7. Akses atas Informasi Publik 534
8. Pendidikan Insan Pers 534
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 534

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 535
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 536
3. Keragaman Kepemilikan 537
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 537
5. Lembaga Penyiaran Publik 538

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 538
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 539
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 539
4. Etika Pers 540
5. Mekanisme Pemulihan 540
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 541

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 542

26. PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi dan Iklim 545
B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Sulawesi Barat 545
C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik 546
D. Tim Peneliti dan Informan Ahli 547

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI SULAWESI BARAT

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 548
2. Kebebasan dari Intervensi 549
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 550
4. Kebebasan Media Alternatif 550
5. Keragaman Pandangan dalam Media 551
6. Akurat dan Berimbang 551
7. Akses atas Informasi Publik 552
8. Pendidikan Insan Pers 552
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 553

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 554
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 555
3. Keragaman Kepemilikan 555
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 556
5. Lembaga Penyiaran Publik 556

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 558
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 558
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 559
4. Etika Pers 559
5. Mekanisme Pemulihan 560
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 560

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 561

27. PROVINSI GORONTALO

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Demografi 567
B. Profil Media 567
C. Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis 568

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI GORONTALO

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 569

2. Kebebasan dari Intervensi 570
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 570
4. Kebebasan Media Alternatif 570
5. Keragaman Pandangan dalam Media 571
6. Akurat dan Berimbang 571
7. Akses atas Informasi Publik 572
8. Pendidikan Insan Pers 572
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 572

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 573
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 574
3. Keragaman Kepemilikan 575
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 575
5. Lembaga Penyiaran Publik 575

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 576
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 577
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 577
4. Etika Pers 578
5. Mekanisme Pemulihan 578
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 578

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 579

28. PROVINSI MALUKU

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi 583
B. Profil Media dan Organisasi Jurnalis di Maluku 583
C. Kasus-kasus Kekerasan Jurnalistik 584
D. Tim Peneliti dan Informan Ahli 585

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI MALUKU

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 586
2. Kebebasan dari Intervensi 586
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 587

4. Kebebasan Media Alternatif 587
5. Keragaman Pandangan dalam Media 587
6. Akurat dan Berimbang 588
7. Akses atas Informasi Publik 588
8. Pendidikan Insan Pers 589
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 589

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 590
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 590
3. Keragaman Kepemilikan 592
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 592
5. Lembaga Penyiaran Publik 592

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 593
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 593
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 594
4. Etika Pers 594
5. Mekanisme Pemulihan 594
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 595

29. PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Geografi 599
B. Profil Media 599
C. Profil Organisasi Wartawan 600
D. Profil Serikat Pekerja Wartawan di Maluku Utara 601
E. Persoalan Kemerdekaan Pers Secara Umum 601

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI MALUKU UTARA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 602
2. Kebebasan dari Intervensi 602
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 603
4. Kebebasan Media Alternatif 603
5. Keragaman Pandangan dalam Media 604
6. Akurat dan Berimbang 604
7. Akses atas Informasi Publik 604

8. Pendidikan Insan Pers 605
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 605

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 606
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 607
3. Keragaman Kepemilikan 608
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 608
5. Lembaga Penyiaran Publik 609

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 609
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 610
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 610
4. Etika Pers 610
5. Mekanisme Pemulihan 611
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 611

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 612

30. PROVINSI BALI

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Media di Bali 615
B. Kekerasan terhadap Wartawan 620

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BALI

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 622
2. Kebebasan dari Intervensi 623
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 624
4. Kebebasan Media Alternatif 624
5. Keragaman Pandangan dalam Media 625
6. Akurat dan Berimbang 625
7. Akses atas Informasi Publik 626
8. Pendidikan Insan Pers 626
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 628

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 629

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 630
3. Keragaman Kepemilikan 631
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 631
5. Lembaga Penyiaran Publik 632

C. Lingkungan Bidang Hukum

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 633
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 634
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 634
4. Etika Pers 635
5. Mekanisme Pemulihan 635
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 635

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 636

31. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Media 639
B. Kekerasan terhadap Wartawan 639

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 641
2. Kebebasan dari Intervensi 641
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 642
4. Kebebasan Media Alternatif 643
5. Keragaman Pandangan dalam Media 643
6. Akurat dan Berimbang 644
7. Akses atas Informasi Publik 644
8. Pendidikan Insan Pers 644
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 645

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 646
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 647
3. Keragaman Kepemilikan 648
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 648
5. Lembaga Penyiaran Publik 649

C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 650
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 651
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 651
4. Etika Pers 651
5. Mekanisme Pemulihan 651
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 652

32. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi 655
B. Profil Media NTT 656
C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat pekerja Wartawan 656
D. Kasus-kasus Kekerasan terhadap Wartawan 657
E. Persoalan Kemerdekaan Pers secara Umum..... 658

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 660
2. Kebebasan dari Intervensi 660
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 661
4. Kebebasan Media Alternatif 661
5. Keragaman Pandangan dalam Media 662
6. Akurat dan Berimbang 662
7. Akses atas Informasi Publik 663
8. Pendidikan Insan Pers 663
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 663

B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 664
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 665
3. Keragaman Kepemilikan 666
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 666
5. Lembaga Penyiaran Publik 666

C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 667
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 667
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 667

4. Etika Pers 668
5. Mekanisme Pemulihan 668
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 669

BAB III : PENUTUP
1. Kesimpulan dan Rekomendasi 670

33. PROVINSI PAPUA BARAT

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Provinsi Papua Barat 673
B. Pertumbuhan dan Perkembangan Pers di Papua Barat 673
C. Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan 674
D. Permasalahan Pers di Papua Barat 674

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI PAPUA BARAT
A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 676
2. Kebebasan dari Intervensi 677
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 677
4. Kebebasan Media Alternatif 678
5. Keragaman Pandangan dalam Media 678
6. Akurat dan Berimbang 679
7. Akses atas Informasi Publik 679
8. Pendidikan Insan Pers 680
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 680
B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 681
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 682
3. Keragaman Kepemilikan 683
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 683
5. Lembaga Penyiaran Publik 684
C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 684
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 685
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 686
4. Etika Pers 686
5. Mekanisme Pemulihan 687

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 687

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan dan Rekomendasi 688

34. PROVINSI PAPUA

BAB I: GAMBARAN UMUM

A. Profil Demografi Provinsi Papua 691
B. Profil Media Provinsi Papua 693
C. Profil Organisasi Wartawan dan Serikat Pekerja Wartawan 693
D. Kasus Kekerasan terhadap Wartawan 693

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI PAPUA

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik
1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan 694
2. Kebebasan dari Intervensi 695
3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan 695
4. Kebebasan Media Alternatif 696
5. Keragaman Pandangan dalam Media 696
6. Akurat dan Berimbang 697
7. Akses atas Informasi Publik 697
8. Pendidikan Insan Pers 698
9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 698

B. Lingkungan Bidang Ekonomi
1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers 699
2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat 700
3. Keragaman Kepemilikan 700
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik 701
5. Lembaga Penyiaran Publik 701

C. Lingkungan Bidang Hukum
1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 702
2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme 702
3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers 703
4. Etika Pers 703
5. Mekanisme Pemulihan 704
6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 704

PENGANTAR

IKP 2018:
Kemerdekaan Pers Meningkat, Hoax dan Penyalahgunaan Juga Meningkat

Yosep Adi Prasetyo
(Ketua Dewan Pers)

Ini adalah ke tiga kalinya Dewan Pers berhasil menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia yang menggambarkan situasi pers Indonesia secara lengkap sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2017. Pada kali ke tiga ini Dewan Pers berhasil menyusun indeks secara lengkap di 34 provinsi se-Indonesia. Pada IKP 2017 indeks yang tersusun baru melingkupi 30 provinsi, sedangkan IKP 2016 hanya mencakup 24 provinsi.

Nilai IKP secara nasional pada tahun 2018 adalah sebesar 69,00, yaitu angka yang menunjukkan bahwa nilai indeks kemerdekaan pers masih "agak bebas". Ada tiga region yang memiliki indeks rata-rata di atas rata-rata nasional yaitu Kalimantan (77,10), Sumatera (73.15), dan Sulawesi (71.04). Keadaan ini membaik dibandingkan kondisi sebelumnya dimana indeks IKP 2017 adalah 68.95. Kenaikan kemerdekaan pers ini terjadi di lingkungan politik, ekonomi maupun hukum.

Namun, bila dilihat lebih detil, kemerdekaan pers Indonesia pada 2017 tetap seperti tahun sebelumnya mengalami defisit di hal kebebasan-untuk (*freedom for*). Di satu sisi aspek-aspek kemerdekaan pers terkait *freedom from* seperti kebebasan wartawan dari kriminalisasi, intimidasi, serta kekerasan berada dalam kondisi baik. Independensi ruang redaksi dan kesejahteraan wartawan dirasa mengkuatirkan.

Dari IKP 2018 tergambarkan bagaimana konglomerasi media, dalam beberapa kasus, menjadikan media hanya alat kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik media bersangkutan. Seperti yang kita ketahui beberapa media saat ini dimiliki oleh pengusaha dan pendiri partai, atau berafiliasi pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Seperti diuraikan di atas, dan dikaitkan dengan berbagai indikator lain, pengaruh dan kendali kelompok kepentingan kuat dalam media massa di Indonesia masih besar.

Di berbagai daerah kelompok tersebut adalah pemerintah daerah melalui mekanisme 'perjanjian kerjasama', politisi lokal dan bisnis kuat yang bergerak di bidang ekstraktif dan *property*. Di beberapa daerah kondisi struktural ekonomi dianggap kurang mendukung media lokal untuk bebas secara ekonomis dari kelompok- kelompok kuat ini. Seperti keadaan pada tahun sebelumnya, kebebasan ruang redaksi juga dipengaruhi oleh ketergantungan pada iklan dan program publikasi dari pemerintah daerah setempat, terutama media-media yang berada di luar pulau Jawa. Di beberapa provinsi, ditemukan bahwa sejumlah wartawan berperan juga sebagai marketing untuk mencari iklan bagi medianya.

Kondisi ini berdampak pada pemberitaan yang menunjukkan keberpihakan media pada salah satu kandidat pada saat pilkada. Hal ini mengakibatkan informasi *hoax* di media sosial seringkali menjadi sumber informasi alternatif yang dipercaya oleh masyarakat sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap berita yang disampaikan oleh media tertentu.

Maraknya pertumbuhan media mengakibatkan terjadi perekrutan wartawan dalam jumlah besar dari berbagai latar belakang pendidikan akademis. Perekrutan ini tak diikuti dengan tersedianya sumberdaya wartawan yang siap pakai. Kebanyakan dari para wartawan baru ini tak pernah mengikuti pendidikan jurnalistik. Banyak di antara mereka yang lebih memilih bekerja dengan jalan pintas yaitu tak turun ke lapangan, tapi cukup menggunakan bahan-bahan dari publikasi media lain. Cara lain adalah dengan menggunakan sumber media sosial atau kloning.

Ada banyak berita *hoax* yang diproduksi oleh situs-situs yang mengaku sebagai situs berita (online abal-abal) yang namanya sengaja dimuat mirip dengan situs resmi tersebut dikutip serta disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Masyarakat sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita *hoax*. Media sosial yang tadinya berfungsi untuk merawat silahturahmi, meng*update* status, atau men*share* kenangan lama kini berubah menjadi ajang untuk menyampaikan sikap politik, keberpihakan, kebencian, dan permusuhan.

Yang rawan adalah ada semacam simbiosis mutualistis dimana ada banyak wartawan menggunakan sumber media sosial untuk mendapatkan ide dan mengembangkan berita, sedangkan media sosial menindaklanjuti berita-berita media yang sebelumnya bersumber dari info di media sosial untuk disebarluaskan. Dengan demikian munculnya efek viral yang luas dan menimbulkan pro-kontra sebuah masalah yang sebetulnya bersumber dari berita *hoax* yang tak jelas ujung-pangkalnya.

Berita-berita *hoax* telah menyita perhatian dunia. Di Indonesia, belakangan ini, berita *hoax* telah memantik gejolak sosial yang bukan tak mungkin bisa berujung pada aksi kekerasan. Ada banyak orang menjadi korban informasi *hoax* di dunia maya. Bisa jadi berita yang dianggap benar, justru sebanarnya adalah berita *hoax*.

Hal inilah awal muasal munculnya efek viral dari berita-berita *hoax*. Ada kemungkinan berita terkait sebuah isu berasal dari media sosial, kemudian dikutip oleh media *online*, dan kemudian karena banyak dibicarakan orang maka media cetak arus utama mengangkat isu tersebut. Efek viral yang muncul menciptakan kebenaran palsu.

Selama ini kemerdekaan pers di Indonesia selalu dinilai secara dikotomis yaitu antara "sudah baik" atau dianggap "sudah kebablasan". Dari indikator yang disurvei, tampak kemerdekaan pers cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya campur tangan negara dan pelembagaan akses informasi seperti kebebasan berserikat, kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, akses atas informasi publik dan keragaman kepemilikan.

Kemerdekaan pers dibayang-bayangi persoalan-persoalan kemandirian perusahaan pers dari kepentingan kuat, intervensi pemilik bisnis pers terhadap rapat redakasi, persoalan yang menyangkut *rule of law* dan tata kelola perusahaan termasuk tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah.

Secara umum perusahaan media di daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber dana dari anggaran pemerintah daerah dan bentuk-bentuk kerjasama yang saling-tergantung cukup membuat media atau perusahaan media kurang independen. Meski tak tertulis dan terang-terangan, kesadaran pengelola media di *level* pengambil keputusan (departemen usaha) untuk menjaga hubungan baik dengan pemberi dana, disadari bersama. Disamping itu, tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah menjadi tantangan bagi dunia jurnalistik, demikian pula toleransi wartawan terhadap suap/amplop yang masih tinggi.

Laporan IKP 2018 kali ini terdiri atas tiga buah buku. Buku pertama merupakan sebuah buku tinjauan nasional yang berisikan tentang kerangka kerja, metodologi, temuan pokok, potret umum kemerdekaan pers 2017, isu-isu khusus yang jadi temuan, dan penutup. Buku ke dua merupakan gambaran detil terkait 34 provinsi yang disurvei, mulai gambaran keadaan pers di setiap provinsi, ulasan detil tentang 20 indikator utama, hingga kesimpulan terhadap persoalan yang dihadapi di setiap daerah. Sedangkan buku ke tiga berisi lampiran-lampiran penting terkait data dan informasi survei secara keseluruhan.

Pada kesempatan ini, saya atas nama Dewan Pers menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan survei dan penyusunan buku IKP 2018 ini, antara lain kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Syah Kuala), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Sumatera Utara (USU), Fakultas Ilmu Komunikasi (Universitas Muhammadiyah Riau), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (STISIPOL Raja Haji), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Andalas), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Bengkulu), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Sriwijaya), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universita Bangka Belitung), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Lampung), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Jambi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Indonesia), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UIN Sultan Maulana Hasanudin), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(Universitas Parahyangan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Diponegoro), Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (Universitas Islam Indonesia), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Surabaya), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Udayana), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Mataram), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Nusa Cendana), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (IAIN Pontianak), Lembaga Pengkajian Agama dan Sosial Budaya (IAIN Antasari Banjarmasin), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Palangka Raya), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Mulawarman), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Borneo Tarakan), FISIP (Universitas Hassanudin), Program Pasca Sarjana (Universitas Sam Ratulangi), Fakultas Hukum (Universitas Tadulako), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Jurnalistik (Universitas Halu Oleo), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Negeri Gorontalo), Lembaga Penerbitan dan Penyiaran (Universitas Sulawesi Barat), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Universitas Darussalam), Fakultas Hukum (Universitas Khairun), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Cendrawasih), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Universitas Negeri Papua), tim survei inti di Jakarta dan semua anggota tim survei dari 34 provinsi.

Jakarta, 5 Desember 2018

Yosep Adi Prasetyo

Ketua Dewan Pers

PRAKATA

BUKTI MENJADI KEBIJAKAN: SEBUAH UPAYA

Antonio Pradjasto H.
Ketua Tim Pelaksana IKP 2018

Tiga putaran sudah indeks kemerdekaan pers dijalankan. Pada putaran ini, untuk pertama kalinya, seluruh provinsi di Indonesia berhasil diteliti, berbeda dengan putaran-putaran sebelumnya, yakni 30 provinsi pada putaran kedua dan 24 provinsi pada putaran pertama. Belum panjang usianya, pun banyak sudah pengalaman yang dilalui. Apalagi jika ditambah dengan dua (2) tahun masa pengembangan konsep, metodologi dan uji coba alat penelitian. Maka, sedikit refleksi pantas untuk dilakukan.

Refleksi pertama, riset ini secara konsisten menunjukkan bahwa dari berbagai aspek kemerdekaan pers tampak bahwa, di satu sisi "tanah" untuk berkembangnya kemerdekaan pers tersedia subur. Di sisi lain, untuk apa dan bagaimana kemerdekaan pers itu dimanfaatkan menjadi persoalan besar pers Indonesia selama 3 tahun terakhir. Bukan berarti bahwa intervensi dari Negara dan kekerasan pada wartawan / media pers sama sekali tidak lagi menjadi ancaman; melainkan ancaman tersebut lebih berkurang, daripada ancaman yang berasal dari penyalahgunaan kemerdekaan pers itu sendiri. Media pers yang sejatinya menjadi jembatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan untuk mengawasi jalannya kekuasaan, oleh sejumlah orang telah disalahgunakan.

Dalam kondisi demikian, Indeks Kemerdekaan Pers menunjang kalau bukan memperkuat 'advokasi' atau program Dewan Pers untuk memperbaiki kinerja media pers Indonesia. Indeks ini telah menopang kebijakan Dewan Pers dengan memberi bukti akan kondisi kemerdekaan pers di Indonesia; aspek-aspek yang sudah maju dan yang masih menjadi tantangan bagi pers yang merdeka. Seiring dengan ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut 'advokasi' Dewan Pers untuk memperbaiki kinerja media pers di situ dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2018 mengenai Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Kedua, proses riset yang melibatkan tidak kurang dari 130 peneliti daerah dan 9 peneliti nasional serta 390 informan yang diwawancarai sesungguhnya telah menjadi media yang mengumpulkan berbagai pihak dengan berbagai latar belakang untuk bertemu, saling membagi pengetahuan dan saling belajar mengenai Kemerdekaan Pers. Mereka adalah staf-staf pemerintah, akademisi, pekerja media, aktivis maupun pelaku bisnis. Diskusi-diskusi kelompok terfokus di tingkat provinsi hingga *National Assesment Council* / Dewan Penyelia Nasional sebagai bagian dari putaran-riset menjadi media untuk melakukan diskursus rasional. Ambilah contoh-contoh berikut ini di tingkat provinsi, di Sulawesi Tenggara berbagai aspek dan indikator dari IKP menjadi bahan perkuliahan. Berbagai aspek dan indikator yang ada di dalam riset IKP ini, juga telah menjadi bahan menarik untuk dibandingkan dengan indeks-indeks kemerdekaan pers yang lain.

Bukan hanya aspek-aspek atau variabel didalamnya yang menarik perhatian, persoalan - persoalan kemerdekaan pers yang ditemukan dalam riset ini juga didiskusikan untuk dicari jalan keluarnya. Dewan Pers secara sengaja berupaya mendekati beberapa pemerintah provinsi, diantaranya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar mengatasi defisit kemerdekaan pers di provinsi tersebut. Perjanjian Kerjasama dilakukan, dilanjutkan dengan pelatihan bagi staf-staf Pemda. Sejumlah staf pemerintahan daerah juga menyatakan

ketertarikannya untuk mendorong pemerintah daerahnya untuk menghormati hak atas Kemerdekaan Pers dengan lebih menghargai profesionalisme media pers. Di daerah lain, upaya untuk mencari jalan keluar tersebut dilakukan secara swadaya. Kapasitas pengelolaan indeks ini untuk mengumpulkan berbagai pihak mengindikasikan munculnya rasa memiliki atas indeks dan embrio bagi lahirnya *epistemic community* untuk menghadirkan kemerdekaan pers.

Ketiga, berbagai capaian ini dilalui karena komitmen, kerja keras, kerja bersama berbagai pihak. Secara khusus komitmen dari Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo (Stanley) yang sudah terlibat sejak penyusunan konsep hingga pelaksanaan riset selama tiga putaran. Saya bersyukur dapat terlibat dan dipercaya mengembangkan indeks ini sejak awal hingga laporan ini disusun. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh anggota Dewan Pers terutama Ratna Komala, Ketua Komisi Penelitian Dewan Pers, dan Jimmy Silalahi, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, yang telah bersedia mendampingi dan memberi sejumlah masukan dalam proses riset ini.

Semangat bekerja bersama juga ditunjukkan oleh 34 koordinator peneliti di provinsi, dari Papua hingga Aceh, yang menjadi ujung tombak pencarian data. Banyak cerita mengenai tantangan, kenikmatan dan buah dari menjalankan riset ini. Satu hal yang menonjol, kerjasama yang baik antara akademisi dan praktisi pers memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Kepada koordinator-koordinator riset provinsi beserta timnya serta 390 informan yang telah diwawancarai kami ucapkan banyak terima kasih. Di tingkat nasional tim peneliti disamping saya, terdiri dari Rustam Fachry Mandayun, Moebanoe Moera, Dwi Ajeng, Dian Andi Nur Azis, Chelsia Chan, dan Artini serta pengolah data Atik Setiowati dan Ari Yurino. Pengalaman dua dan tiga tahun berjalan bersama cukup membantu menjalankan kompleksitas proses riset secara bertahap.

Di hadapan pembaca tersedia 'rapor' kemerdekaan pers di Indonesia dan berbagai tantangan serta peluang untuk memajukan kualitas kemerdekaan pers di Indonesia. Rapor yang menggambarkan situasi nasional dan antar provinsi dipaparkan dalam 3 buku. Buku pertama ini menilai kondisi kemerdekaan pers nasional 2017. Buku kedua mengenai IKP di 34 provinsi dan buku ketiga berisi informasi mengenai kekerasan, data-data dan daftar pustaka.

Sebagai bagian penting dari demokrasi, laporan hak atas kemerdekaan pers ini kami persembahkan bagi semakin substansinya demokrasi di Indonesia.

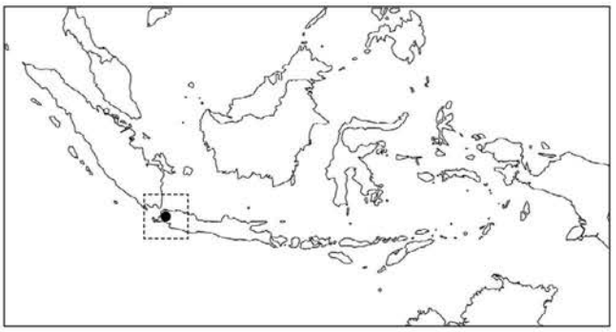

11

PROVINSI BANTEN

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2018 PROVINSI BANTEN

BAB I: GAMBARAN UMUM

Dengan tipikal masyarakat Banten, kendati mayoritas muslim, namun toleransi dan pruralisme di wilayah ini terjaga dengan baik. Tidak ada diskriminasi terhadap SARA, khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang pers. Artinya, pemerintah daerah tidak membiarkan atau tidak melakukan praktik diskriminasi atas dasar suku, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Jumlah penduduk Banten tahun 2017, berdasarkan data BPS Banten, tercatat 12.45 juta.

A. Profil media

Kemajuan teknologi berdampak pada nilai kemerdekaan pers di Provinsi Banten yang dapat dikategorikan baik, dengan melihat pertumbuhan sejumlah organisasi pers yang berkembang di wilayah ini seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalisik Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS). Media yang berada di Banten pun pertumbuhannya cukup pesat. Sebelum Banten menjadi sebuah provinsi yang terpisah dari Jawa Barat, sebenarnya telah lahir sebuah media alternatif yang hingga saat ini masih bertahan, yaitu Majalah TERAS.

Kemudian, setelah Banten menjadi sebuah Provinsi mulai bermunculan dan berkembang sejumlah media lokal yang masih terbit hingga saat ini, di antaranya: Radar Banten, Baraya pos, Baraya TV, Tangerang Ekspres, Radar TV (Jawa Post), Satelit News, Tangsel Pos dan Banten Pos (Rakyat Merdeka), dan Kabar Banten (Pikiran Rakyat).

Selain media-media yang disebutkan di atas, masih ada beberapa harian daerah lainnya seperti Warta Banten dan Tangerang Raya, serta 27 media mingguan lainnya. Ekspansi media semakin kuat dalam mengendalikan masyarakat melalui sumber-sumber produksi media berupa teknologi, jaringan dan lainnya. Seperti di sektor elektronik, yang saat ini di Banten tercatat sudah ada 27 radio yang tergabung dalam PRSSNI, serta sejumlah stasiun televisi lokal seperti Carlita TV, Cahaya TV, BantenTV (INTV), Untirta TV, UIN Banten TV, CTV Banten, BSTV,dan TV3, yang mengalami perkembangan cukup siginifikan dalam memberikan informasi ke masyarakat. Meski surat kabar dan media-media yang ada di Provinsi Banten ini adalah *community newspapers* yang diartikan sebagai surat kabar lokal, namun dari segi pemberitaannya tetap juga mengakomodir isu atau peristiwa nasional dan internasional. Dengan format *community newspapers* ini, media lokal Banten secara keseluruhan memberikan pilihan kepada pembaca untuk memilih rubrik mana yang sesuai dengan komunitas mereka baik dari golongan bawah, menengah, maupun golongan atas.

Hingga saat ini sejumlah *community newspapers* masih eksis dan terus berbenah diri serta tidak berhenti mengembangkan inovasi dan kreatifitas. Kualitas dan kuantitas berita terus diperbaharui, termasuk sumber daya manusianya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyajian karikatur Si Banten Raya Post yang temanya lebih dititikberatkan pada persitiwa dan informasi lokal yang ada di Banten. Untuk itu, perkembangan media dewasa ini mutlak menjadi salah satu sumber informasi yang akan siap dikonsumsi oleh publik.

B. Kasus-kasus kekerasan jurnalis

Kekerasan terhadap wartawan di Banten bisa dibilang tidak ada. Hal tersebut bisa dilihat skor rata-rata pada dimensi ini, yakni 79.79 (situasi baik). Penegak hukum dan keamanan dinilai mampu melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan

non-Negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan. Kepolisian setempat secara rutin menggelar pertemuan dengan wartawan untuk saling bertukar informasi.

BAB II: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS DI PROVINSI BANTEN

Tabel 11.1
IKP Provinsi Banten

Bidang	Fisik dan Politik	Ekonomi	Hukum
Rata-rata	76,89	69.60	81.78

Tabel 11.1 menunjukkan nilai rata-rata tertinggi ada pada indeks lingkungan hukum dengan kategori baik, diikuti politik dan ekonomi dengan skor lebih rendah.

Tabel 11.2
Perbandingan IKP Provinsi Banten Tahun 2016,2017,2018

Indeks	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
IKP	69.92	sedang	73,13	baik	83.19	baik

Selama tiga tahun berturut-turut sejak 2016 tampak IKP Provinsi Banten menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Sejak dua tahun berturut-turut mulai tahun 2017, Provinsi Banten pada posisi baik, yang dapat diinterpretasikan bahwa kondisi kemerdekaan pers di Banten menuju pertumbuhan positif. Informan ahli menilai kondisi tersebut karena selain kemajuan teknologi, saat ini sudah tumbuh kesadaran bermedia di kalangan masyarakat. Untuk melihat bagaimana kondisi lingkungan politik digunakan sembilan indikator dengan 27 dimensi, untuk kondisi lingkungan ekonomi digunakan lima indikator dengan 18 dimensi dan lingkungan hukum dengan enam indikator dengan 16 dimensi.

A. Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

Tabel 11.3
Lingkungan Bidang Fisik dan Politik

No.	Variabel	Rata-rata
1.	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	77.80
2.	Kebebasan dari Intervensi	73.23
3.	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan	79.79
4.	Kebebasan Media Alternatif	79.14
5.	Keragaman Pandangan dalam Media	76.00
6.	Akurat dan Berimbang	75.06
7.	Akses atas Informasi Publik	81.81
8.	Pendidikan Insan Pers	73.00
9.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	60.50

Berdasarkan tabel di atas, skor tertinggi antara lain pada aspek akses atas informasi publik (81.81), dan aspek kebebasan dari kekerasan (79.79). Sementara, skor terendah pada aspek kesetaraan kelompok rentan (60.50), dan aspek pendidkan insan pers (73.00).

Merujuk hasil wawancara dengan informan ahli Banten, aspek atas informasi publik dirasakan lebih terbuka dengan adanya regulasi yang mendukung serta era teknologi informasi yang memungkinkan setiap orang mudah mencari dan mengakses informasi yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah ditujukan untuk mempermudah diseminasi informasi publik, pemerintah menyediakan website. Begitu pula dengan aspek kebebasan dari kekerasan terhadap media dan jurnalis, dipandang tidak ada masalah. Setidaknya, sepanjang 2017 di Provinsi Banten tidak ada catatan yang menunjukkan hal tersebut yang dipandang serius.

Namun, yang masih harus diperhatikan adalah aspek kesetaraan akses bagi kelompok rentan. Seluruh lapisan masyarakat dari kelompok rentan dan kelompok marjinal, semua dipandang masih sangat minim memperoleh ruang yang diakses di media massa.

Aspek lain yang patut diperhatikan oleh kalangan media dan jurnalis adalah pendidikan insan pers, aspek ini sangat minim intervensi dari berbagai pihak, sehingga wartawan bebas ingin berlatih ilmu didalam atau luar negeri. Untuk itu, di Banten kesadaran pelatihan harus ditingkatkan dan perlu berkelanjutan.

1. Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

Kebebasan wartawan bergabung dengan organisasi/serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan memperoleh nilai dengan kategori baik. Artinya para informan ahli menilai partisipasi wartawan di wilayah ini cukup baik untuk masuk dalam organisasi/serikat pekerja wartawan.

Namun demikian, menurut informan ahli, kebebasan berserikat bagi wartawan di Banten pada hakikatnya belum optimal bagi wartawan untuk ikut serta dalam serikat kerja wartawan dan lembaganya juga belum terbentuk. Selanjutnya, apabila wartawan mengikuti serikat kerja wartawan, masih ada kekuatiran bisa mengancam kesejahteraan wartawan khususnya di media *online,* organisasi wartawan bebas dari pelanggaran dan membebaskan diri.

Tabel 11. 4
Kebebasan Berserikat bagi Wartawan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan	83,45
2	Wartawan bebas bergabung dengan serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	70,50
3	Organisasi profesi wartawan dapat beroperasi, bersikap, dan bebas dari ancaman pelanggaran kebebasan pers	81,27
4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kebebasan pers	77,27

2. Kebebasan dari Intervensi

Pada indikator ini ada lima dimensi yang dinilai berpotensi dapat mempengaruhi keberadaan dan independensi ruang redaksi, seperti ancaman berupa pencabutan izin usaha, pembredelen dan sensor, serta tekanan dan campur tangan banyak pihak (politik, ekonomi, dan pemilikperusahaan).

Memang, sejak era reformasi dideklarasikan, tidak pernah lagi terdengar adanya pembredelan terhadap media seperti kerap terjadi di masa pemerintahan otoriter Orde Baru. Skor rata-rata dimensi ini terbilang baik, yakni 73.23. Salah satunya, bagaimana kedekatan pers dengan penguasa daerah, terutama pada era dinasti Banten. Pada saat itu,

pers berkecenderungan dijadikan alat kepentingan penguasa. Sementara pada saat ini, walaupun dinasti seakan telah hilang, tetapi pers tetap belum sepenuhnya bisa bekerja secara independen. Pers masih memiliki ketergantungan pada siapa yang memberikan kontribusi besar pada bidang usahanya. Inilah yang kemudian melandasi bagaimana nilai pada aspek independensi pers terhadap berbagai kepentingan tergolong sedang, yakni 61.27.

Selanjutnya, menurut informan ahli, kebebasan dan inteversi kasus pembatasan terhadap isi berita, sejauh ini wartawan di Banten bebas dari pelanggaran selama berita yang diambil oleh mereka sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh Negara. Wartawan memajukan kebebasan pers karena berita yang disajikan tergantung kepada wartawan apakah bisa meningkatkan kesejahteraan pers itu sendiri.

3. Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

Kekerasan terhadap wartawan di Banten bisa dibilang tidak ada. Hal tersebut bisa dilihat skor rata-rata pada dimensi ini, yakni 79,79 (situasi baik). Penegak hukum dan keamanan dinilai mampu melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan. Menurut informan ahli, kasus kasus kekerasan terhadap wartawan oleh aparatur Negara dalam berbagai bentuk di Banten sejauh ini kekerasan tidak pernah dilakukan kepada wartawan. Namun kejadian di Cilegon beberapa tahun lalu yang langsung mengkofirmasi kepada masyarakat bahwasannya itu adalah sebuah insiden kecil saja dan penegak hukum juga ikut melindungi wartawan agar terhindar dari kasus kejahatan, dan sebagainya.

Tabel 11.5
Kebebasan Wartawan dari Kekerasan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tindakan aparat Negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan	78,64
2	Wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan, atau kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat Negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan	81,27
3	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-Negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan	79,45

4. Kebebasan Media Alternatif

Media alternatif berkembang pesat di Banten. Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme waraga. Terbukti, para informan ahli memberikan nilai baik pada skor rata-rata dimensi ini (79,14). Menurut informan ahli, pertumbuhan dan perkembangan jurnalisme warga secara spesifik berkembang di Banten, namun belum menyebar luar di kalangan masyarakat, paling hanya dari warga itu sendiri dipimpin oleh organisasi tertentu dan diunggah di media sosial agar lebih berkembang.

Tabel 11.6
Kebebasan Media Alternatif

No.	Indikator	Rata-rata
1	Pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*)	76.82
2	Jurnalisme warga di daerah ini memberikan kontribusi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers	81.45

5. Keragaman Pandangan dalam Media

Pada indikator ini ada tiga dimensi yang dapat mendorong keragaman pandangan, seperti keragaman dalam pemberitaan dan keragaman dalam kepemilikan perusahaan pers. Skor rata-ratanya terbilang baik (76.00).

Hal tersebut sangat berkorelasi dengan tipikal masyarakat Banten. Kendati mayoritas muslim, namun toleransi dan pruralisme di wilayah ini terjaga dengan baik. Tidak ada diskriminasi terhadap SARA, khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang pers. Dalam konteks ini, para informan ahli yang terdiri dari birokrat, tokoh masyarakat, serta pelaku dari industri media massa dan wartawan, memberikan nilai rata-rata baik. Artinya, pemerintah daerah tidak membiarkan atau tidak melakukan praktik diskriminasi atas dasar suku, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya.

6. Akurat dan Berimbang

Skor rata-rata dimensi ini menunjukkan pada situasi baik (75.06). Rupanya, masalah keakuratan dan keberimbangan mendapat perhatian oleh semua pihak. Menurut informan ahli, sejauh ini masyarakat selalu mendapatkan berita yang akurat dan berimbang dari masyarakat tergantung kepada bukti-bukti aktual yang diterima masyarakat. Berbeda dengan media *online*, di Banten masih kurang dalam memahami dunia jurnalis dan jurnalisnya kurang faham sehingga tidak melakukan sensor diri. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM insan pers itu penting.

Tabel 11.7
Akurat dan Berimbang

No.	Indikator	Rata-rata
1	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk, yang disampaikan media	78,91
2	Wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (*self cencorship*)	76,27
3	Intensitas pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang (intervensi) isi pemberitaan	70,00

7. Akses atas Informasi Publik

Dari empat dimensi diteliti, persepsi terhadap dimensi ini cenderung dinilai baik, dengan skor rata-ratanya 81.81. Hal tersebut menandakan bahwa akses dan informasi publik sudah sangat terbuka. Ada sinergi dari semua elemen, baik dari pemeritah daerah, industri media dan pers lokal, serta komisi informasi dalam hal membangun keterbukaan informasi sudah sejalan sebagaimana yang diharapkan.

8. Pendidikan Insan Pers

Harus diakui, pelatihan bagi wartawan di Banten dirasakan masih belum optimal. Namun, secara keseluruhan, langkah menuju profesionalitas semakin baik.Terbukti, nilai rata- ratanya mencapai 73.00.

9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Perhatian pemerintah dan kalangan media terhadap kelompok minoritas, terutama bagi mereka yang berkebutuhan khusus (disabilitas), masih sangat rendah. Ketersediaan fasilitas (seperti alat bantu), masih sangat minim. Bahkan, mereka kurang mendapatkan ruang serta menjadi bagian dari pemberitaan. Terbukti, skor rata-rata pada dimensi ini tergolong rendah, yakni 60.50.

Tabel 11.8
Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Indikator	Rata-rata
1	Media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas	74,18
2	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan	66,22
3	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)	39,90

B. Lingkungan Bidang Ekonomi

Tabel 11.9
Lingkungan Bidang Ekonomi

No.	Variabel	Rata-rata
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	71.44
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	57.64
3	Keragaman Kepemilikan	75.91
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	70.48
5	Lembaga Penyiaran Publik	72.77

Dari lima indikator kondisi lingkungan ekonomi di atas, tampak bahwa independensi dari kelompok kepentingan yang kuat memperoleh skor paling rendah, yaitu pada posisi 57.64. Skor ini tidak berbeda jauh dengan hasil survei IKP 2016 yang memperoleh skor 57.42. Dengan demikian, secara berturut-turut nilai pada sub-indikator independensi dari kelompok kepentingan yang kuat hasil Survei IKP 2016, 2017, dan 2018 bertahan pada kategori sedang (agak bebas). Sedangkan skor tertinggi pada keragaman kepemilikan yang memperoleh skor 75.91. Nilai ini mengalami penurunan dibanding dengan hasil skor IKP 2016 pada indikator yang sama, yaitu78.08.

1. Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers

Secara umum, kondisi kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di Banten sudah baik (cukup bebas) dengan skore rata-rata 71.44. Namun, dari 9 item pertanyaan dalam indikator ini, ada satu poin pertanyaan yang memperoleh penilaian buruk dengan score rata-rata 53.45 yaitu pada poin pertanyaan nomor 5: " sejauh mana alokasi dana untuk iklan dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?". Ini artinya bahwa pers di Banten belum sepenuhnya bebas dari ketergantungan dana dari pemerintah. Pemerintah daerah, dalam hal ini pejabat-pejabat di dinas-dinas atau SKPD-SKPD bisa saja menekan redaksi dengan ancaman penghentian dana iklan atau dana lainnya jika redaksi berani memuat berita tidak baik atau negatif mengenai pejabat atau dinas tertentu. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi indenpendensi redaksi dalam memuat berita.

Kondisi ini tampaknya sejalan dengan penilaian dari informan ahli yang berpendapat bahwa media memiliki ketergantungan yang tinggi pada pendapatan iklan dari pemerintah daerah.

Perusahaan media tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pembiayaan atau pendanaan perusahaan hanya dari iklan yang bersumber dari pihak atau lembaga swasta, perorangan, atau dari hasil oplah penjualan media kepada konsumen karena tidak mencukupi untuk biaya operasional perusahaan media. Dengan demikian, keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan media seringkali sangat bergantung pada pendanaan dari iklan yang dipasang oleh pemerintah daerah yang umumnya bisa dilakukan secara rutin, pasti dan berkelanjutan karena biasanya dana iklan sudah masuk dalam anggaran APBD. Konsekuensinya, perusahaan- perusahaan media harus dapat memahami, memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan daerah, dalam hal ini kepentingan para pejabat dan dinas-dinas terkait, ketika hendak memuat berita. Posisi dan kondisi inilah yang menempatkan perusahaan media dan redaksi seperti makan buah simalakama yang berakibat pada berkurangnya kebebasan pers dan fungsi kontrol media terhadap berbagai penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah. Meskipun perizinan pendirian dan operasionalisai perusahaan media mengalami perbaikan sejak diterbitkannya UU No.40/1999 di masa reformasi yang mengatur Pers, namun demikian perusahaan media tidak serta merta bebas dari keberpihakan dan memiliki kebebasan penuh dalam memuat sebuah isu atau berita, karena kenyataannya mereka (perusahaan media) juga bergantung pada kondisi financial untuk dapat memelihara keberlangsungan perusahaan media mereka agar tidak mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini, dana dari pemerintah daerahlah yang dianggap dapat mengatasi problem financial perusahaan media.

Oleh karena itu, dana dari pemerintah daerah, dan juga support financial dari pihak swasta dan perorangan, memiliki pengaruh besar terhadap independensi dan kemerdekaan perusahaan media. Independensi dan kemandirian ruang redaksi atas berita yang dimuat, khususnya terkait program dan kegiatan pemerintah daerah, masih terus diuji.

Artinya, jika perusahaan media mampu menyediakan dana atau anggaran yang cukup untuk operasionalisasi perusahaan media tanpa bergantung dari pendanaan pemerintah daerah, kemerdekaan pers akan samkin membaik; sebaliknya, semakin perusahaan media bergantung pada pendanaan dari pemerintah daerah, kemerdekaan dan kebebasan pers semakin terancam dan akan kehilangan fungsi kontrolnya pada pemerintah.

2. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Secara umum, indikator Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat memperoleh skor terendah dibanding empat indikator lainnya dalam dimensi atau lingkungan ekonomi, yakni hanya memperoleh score 57.64. Nilai ini masuk dalam kategori sedang (agak bebas). Skor ini tidak berbeda jauh dengan hasil survei IKP 2016 yang juga memperoleh skor 57.42 pada indikator dan dimensi yang sama. Begitu juga dengan hasil survei IKP 2017 yang menunjukkan angka yang tidak beranjak jauh dari hasil survei IKP 2016 dan 2018.

Dari lima poin pertanyaan yang ada dalam kategori ini, poin pertanyaan no.13 "sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan?" memperoleh nilai terendah, yaitu hanya 46,00 atau dalam kategori buruk (kurang bebas). Selanjutnya nilai rendah juga diperoleh pada poin pertanyaan no 11 "sejauh mana wartawan/ media di daerah ini mentolelir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media?" yang hanya memperoleh score 53.27 atau masuk dalam kategori buruk (kurang bebas). Sementara, nilai tertinggi diperoleh untuk poin pertanyaan no 10 "sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya"?, yang memperoleh skor 72.36, masuk dalam kategori baik.

Dapat dipahami mengapa skor hasil survei IKP selama tiga tahun berturut-turut (2016- 2018) pada indikator independensi dari kelompok kepentingan yang kuat ini bertahan pada kategori sedang (agak bebas). Sebagaimana dijelaskan dalam Laporan IKP 2016 untuk wilayah Provinsi Banten (h. 123) bahwa situasi ekonomi di Provinsi Banten lah yang mempengaruhi independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat.

Di Banten, ketergantungan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar, dan kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan dikatakan cukup tinggi. Praktik pemberian amplop kepada wartawan oleh orang-orang

yang berkepentingan menjadi praktik yang dianggap lazim dan lumrah sehingga mengurangi independensi pers dalam menghasilkan berita.

Selain itu, kuatnya jaringan kelompok tertentu yang masih menguasai Banten baik di pemerintahan, bisnis dan usaha, juga partai politik tampaknya sangat memengaruhi psikologis dan independensi jurnalis ketika ingin mengungkap fakta dan berita yang benar dan berimbang. Jika itu sudah menyentuh kepentingan kelompok kuat dan berpengaruh tersebut sehingga tidak jarang sebuah berita atau isu tertentu tidak jadi dimuat menjadi sebuah berita karena kekhawatiran adanya reaksi keras dari kelompok kuat dan berpengaruh tersebut yang bisa mengganggu kenyamanan dan keberlangsungan pekerjaan jurnalis dan pemilik media. Selain itu, hadirnya jurnalis 'abal-abal' yang seringkali datang kebeberapa dinas atau lembaga pendidikan yang memperoleh anggaran dari APBN atau APBD seperti dana BOS di sekolah-sekolah yang datang hanya berharap atau bisa dikatakan memaksa memperoleh 'amplop' atau uang transport dari pihak terkait sangat mempengaruhi citra indenpendensi pers dalam pandangan masyarakat.

Berikut adalah table nilai hasil survei dimensi ekonomi untuk indicator Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat.

Tabel 11.10
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Indikator	Rata-rata
1	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya	72.36
2	Wartawan/media di daerah mentolelir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media	53.27
3	Pemerintah daerah memberIpenghargaan bagi pers profesional	62.27
4	Situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, perusahaan besar atau kekuatan politik lain sebagai sumber pendanaan	46,00
5	Terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi	65.40

3. Keragaman Kepemilikan

Pada dimensi ini, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 75.91 atau masuk dalam kategori baik atau cukup bebas. Artinya bahwa kepemilikan perusahaan media tidak didominasi atau dimonopoli oleh satu perusahaan besar, tetapi oleh banyak perusahaan media baik cetak maupun *online* dan juga media penyiaran baik TV lokal, TV komunitas dan radio komunitas, baik dalam skala besar atau kecil. Oplah paling banyak dari media cetak masih didominasi oleh Kelompok Jawa Post terutama Koran Radar Banten yang menjadi langganan harian banyak lembaga-lembaga/ dinas-dinas/SKPD-SKPD di Provinsi Banten, lembaga-lembaga pendidikan, perusahaan-perusahaan, serta individu-individu. Mayoritas masyarakat Banten secara individual juga lebih sering membeli dan membaca Koran Radar Banten ketimbang koran-koran yang lain.

Namun demikian, seiring perkembangan zaman, media *online* mulai mendominasi kecenderenungan masyarakat untuk membaca berita popular karena dianggap lebih hemat, efektif, dan efisien ketimbang harus membaca Koran atau media cetak. Oleh karena itu, sejak masyarkat melek teknologi, banyak bermunculan media-media *online* di Banten dengan lokus dan kekhasannya masing-masing.

4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Secara umum, nilai rata-rata untuk indikator ini tergolong baik dengan skor 70.48. Satu poin pertanyaan untuk indikator ini yang memperoleh nilai 69 atau masuk dalam kategori sedang (cukup baik), yaitu pada poin "Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 3 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/peratura-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?".

Rendahnya skor rata-rata yang diberikan para informan ahli menunjukkan adanya permasalahan kesejahteraan para wartawan sehingga tidak jarang wartawan sulit menampik atau menolak ketika diberi 'amplop' dari seseorang/ kelompok/perusahaan/partai tertentu yang sedang diangkat isunya untuk menjadi sebuah berita sehingga sulit bagi wartawan untuk mempertahankan independensinya karena faktor 'amplop' ini. Tidak jarang beberapa wartawan juga secara sengaja 'meminta jatah amplop' ketika meliput suatu kegiatan atauberita.

Berikut adalah table perolehan nilai tata kelola perusahaan yang baik.

Tabel 11.11
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Indikator	Rata-rata
1	Tata kelola perusahaan Pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik	70,50
2	Transparansi kepemilikan perusahaan pers di daerah	73,00
3	Wartawan mendapat paling sedikit 3 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers	69,00

5. Lembaga Penyiaran Publik

Secara umum, dimensi ekonomi yang masuk dalam indikator lembaga penyiaran publik sudah berjalan dengan baik atau cukup bebas. Ini tampak dari rata-rata skor yang diperoleh untuk aspek ini, yaitu angka 72.77. Dari tujuh poin pertanyaan yang ditanyakan dalam dimensi ini, hanya satu poin yang memperoleh nilai rata-rata di bawah angka 70, yaitu poin no.23 "sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?", yang memperoleh skor 69.09 dengan kategori sedang (agak baik), namun mulai mendekati kategori baik.

Berikut adalah tabel 11.12 nilai rata-rata dimensi Lembaga Penyiaran Publik.

Tabel 11.12
Lembaga Penyiaran Publik.

No.	Indikator	Rata-rata
1	lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan mempresentasikan kepentingan publik	79.09
2	Pemerintah di daerah ini mendorong danmemperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah ini berorientasi pada publik	70.73
3	Perizinan frekuensi radio dantelevisekomunitas di daerah ini diproses seuai peraturan	72.20
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	72.55
5	Dewan Pers mendorong Pers agarmenyiarkan aspirasi masyarakat di daerah	69.09
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diprovinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	70.45
7	Komisi Informasi (KI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat	75.36

C. Lingkungan Bidang Hukum

Tabel 11.13
Lingkungan Bidang Hukum

No.	Variabel	Rata-rata
1.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	77.10
2.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	80.00
3.	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	81.46
4.	Etika pers	71.68
5.	Mekanisme Pemulihan	79.88
6.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	50.80

Seperti terlihat dalam tabel di atas, skor tertinggi pada indikator kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi pers (81.46) dan skor terendah pada indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, yakni 50.80.

Secara deskriptif, berdasarkan hasil wawancara dengan informan ahli dan *Focus Group Discussion*, aspek kriminalisasi dan intimidasi pers dinilai tinggi karena di Banten sampai saat ini tidak ada peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Gubernur (PERGUB) maupun dalam bentuk surat edaran terkait dengan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaan yang dimuat di medianya. Pemerintah daerah juga dinilai sudah lebih memahami keberadaan dan keberagaman media, sehingga sepanjang 2017 tidak ditemukan intimidasi, intervensi maupun sensor terhadap isi berita.

Sementara perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas jarang ditemui kasusnya. Hasil wawancara dengan informan ahli dan pada saat *Focus Group Discussion* disampaikan bahwa bagi lembaga penyiaran jasa televisi tidak ada yang menggunakan peraga berita dikarenakan mahalnya biaya. Terlebih lagi, sampai saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah yang memperhatikan penyandang disabilitas.

1. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Skor rata-rata pada dimensi ini, kendati masuk dalam kategori baik (77.10), . berdasarkan catatan selama 2017, tidak ditemukan kasus yang dialami wartawan pada saat melakukan kegiatan jurnalistik maupun pemberitaan yang dibuat oleh wartawan tersebut. Saat ini masyarakat dianggap semakin paham bagaimana menggunakan saluran-saluran yang ada jika merasa keberatan terhadap berita.

Tabel 11.14
Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)	84.17
2.	Lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers	79.00
3.	Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	67.56
4.	Aparat pemerintah daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	74.36
5.	Satuan kerja pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers	73.64

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa skor rata-rata tertinggi adalah 84.17 yang masuk dalam kategori **Baik** adalah lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (parsial). Sedangkan skor rata-rata terendah adalah sebesar 67.56 dengan kategori Sedang yang mendekati kategori **Baik**.

2. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Skor rata-rata dalam dimensi ini adalah 80.00 dan berada dalam kategori Baik. Skor ini menandakan peraturan dan kebijakan di Banten dipandang bisa menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

3. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Aspek kriminalisasi dan intimidasi pers dinilai tinggi karena di Banten tidak ada peraturan yang dapat memidanakan wartawan. Pun, sejauh ini pemerintah daerah di Banten tidak memberlakukan aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang membatasi gerak wartawan. Setiap wartawan boleh mengakses dan mendapatkan berita sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini terlihat sebagaimana gambaran dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11.15
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Peraturan Daerah dapat memidana wartawan karena pemberitannya	85.33
2.	Peraturan Daerah memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik	78.29
3.	Peraturan Daerah memberlakukan sensor bagi wartawan	66.00
4.	Pemerintah Daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers	83.80

4. Etika Pers

Persepsi terhadap dimensi ini, aspek etika pers mendapatkan skor rata-rata 71.68 yang berada dalam kategori Baik. Hal ini dinilai karena para wartawan di Banten, dinilai sudah memahami dan menjalankan etika pers sebagai landasan etik dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Secara rinci, dimensi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.16
Etika Pers

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Pemerintah Daerah mendorong wartawan menaati Kode Etik Pers dan Standar Perusahaan Pers	72.82
2.	Wartawan menaati UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik	70.55

5. Mekanisme Pemulihan

Secara umum skor rata-rata aspek mekanisme pemulihan sebesar 79.88 yang berada pada kategori baik. Kategori baik ini dapat dimaknai bahwa peran Lembaga Negara yang terkait pers di Banten, seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Banten dan Komisi Informasi Provinsi Banten, dipandang sudah menunjukan kinerja yang baik. Begitu pula dengan peran lembaga peradilan, dinilai lebih mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa pers menurut UU Pers ketimbang peradilan umum.

Tabel 11.17
Mekanisme Pemulihan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Penanganan sengketa pers oleh Dewan Pers dilakukan secara bebas dan independen	82.56
2.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten bekerja secara bebas dan independen	82.20
3.	Komisi Informasi Provinsi Banten bekerja secara bebas dan independen	82.00
4.	Aparat Hukum melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan, seperti penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan.	77.89
5.	Penyelesaian perkara pers mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum	79.89
6.	Penyelesaian perkara pers mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana	81.33

6. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Tidak ada Peraturan Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Banten, menerapkan aturan yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh kalangan penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Dengan begitu, skor rata-rata dimensi ini sebesar 50.80 atau berada pada kategori penilaian yang buruk.

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018

Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. Agar pers dapat melakukan peranannya, perlu ada jaminan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain itu, untuk menegakkan pilar keempat demokrasi, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Pers tidak boleh hanya sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal, pertama adalah struktur (*freedom from*) dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen ditengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang ke dua adalah performance (*freedom to*) dimana kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik dan sebagainya.

ISBN 978-602-8721-34-9

9 786028 721349

DEWANPERS

Diterbitkan oleh: **Dewan Pers**
Gedung Dewan Pers Lantai 7-8; Jl. Kebon Sirih No. 32-34; Jakarta Pusat
Telp. (021) 3504874-75, 77; Faks. (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id
E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id; pengaduan@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers